

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semakin banyak dan kompleksnya suatu dinas atau organisasi tentu akan menyebabkan banyaknya kegiatan atau keperluan, seperti halnya pengeluaran yang harus dilaksanakan secara cermat dan teliti, terutama menyangkut pencairan dana belanja, belanja-pun mempunyai klasifikasi yaitu; klasifikasi ekonomi (jenis belanja); selanjutnya, organisasi; dan yang terakhir, fungsi. Didalam klasifikasi ekonomi meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, bantuan sosial, dan juga belanja tak terduga. Belanja dikeluarkan karena adanya suatu kehendak atau keinginan yang ingin dilakukan, dengan kata lain belanja diartikan sebagai dana atau uang yang harus dikeluarkan oleh dinas atau organisasi tersebut untuk suatu tujuan.

Dinas Pendidikan Provinsi merupakan salah satu perangkat pemerintahan yang unsur pelaksanaannya di pemerintahan provinsi. Peningkatan kualitas pendidikan yang selalu diharapkan semua lapisan masyarakat di negara ini tentulah menjadi fokus kegiatan insan pendidikan di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan amanat undang-undang, besaran anggaran pendidikan harus 20 persen dari postur APBD dan APBN yang tertuang di UUD 1945 pasal 31 ayat 4 dan UU Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 pasal 49 ayat 1. Dengan kata lain, belanja merupakan bagian terpenting dalam kegiatan operasional dinas atau lembaga daerah, oleh karena itu belanja harus

berjalan efektif dan efisien dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaannya dan dapat menjelaskan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh dinas tersebut.

Belanja menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyatakan Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Negara/Daerah. Definisi lain Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.59 Tahun 2007 dan adanya perubahan kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua, belanja dikelompokkan menjadi belanja langsung, dan belanja tidak langsung. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung adalah belanja yang terkait secara langsung dengan kegiatan (Aktivitas), Mahmudi, (2010:165).

Belanja langsung terdiri dari belanja; belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan, Belanja modal. Belanja langsung yang dikeluarkan juga harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh dinas, sehingga yang dikeluarkan dalam belanja akan saling mendukung dengan rencana kerja dan kegiatan yang dilakukan dalam dinas Pendidikan Sumatera Barat.

Pencairan dana belanja langsung pada suatu dinas sangatlah penting dan erat kaitannya dengan keuangan. Prosedur pencairan dana belanja langsung di Dinas Pendidikan Sumatera Barat juga harus sesuai dengan Visi dan Misi dari dinas tersebut, sehingga apa yang ingin dicapai oleh dinas Pendidikan Sumatera Barat bisa terlaksana

dan tercapai. Dalam melakukan pencairan dana tersebut diperlukan suatu prosedur pencairan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh dinas.

Dengan demikian, mengacu pada bagaimana belanja langsung itu bisa dicairkan dengan baik dan tepat, maka penulis tertarik membahas lebih dalam lagi bagaimana Dinas Pendidikan Sumatera Barat melakukan prosedur pencairan dana belanja, untuk lebih lanjut tentang masalah diatas maka penulis bermaksud untuk Menyusun Tugas Akhir yang berjudul : **“PROSEDUR PENCAIRAN DANA BELANJA LANGSUNG PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT.”**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pencairan dana belanja langsung pada Dinas Pendidikan Sumatera Barat?
2. Apa saja belanja langsung yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Sumatera Barat?
3. Hambatan yang terjadi saat pencairan belanja langsung pada Dinas Pendidikan Sumatera Barat?

1.3 Tujuan Magang

Adapun tujuan dari kegiatan magang ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami prosedur pencairan dana belanja langsung pada Dinas Pendidikan Sumatera Barat.

2. Untuk mengetahui apakah dana belanja langsung tersebut dibuat sesuai dengan kebutuhan Dinas Pendidikan Sumatera Barat.
3. Untuk mengetahui apa saja hambatan saat pencairan dana belanja langsung di Dinas Pendidikan Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Magang

1. Bagi Penulis

Bagi penulis laporan ini dapat menambah ilmu dan wawasan mengenai prosedur pencairan dana belanja langsung.

2. Bagi Akademik

Dapat menambah kepustakaan dan dapat memberikan masukan khususnya mengenai belanja langsung di Dinas Pendidikan Sumatera Barat.

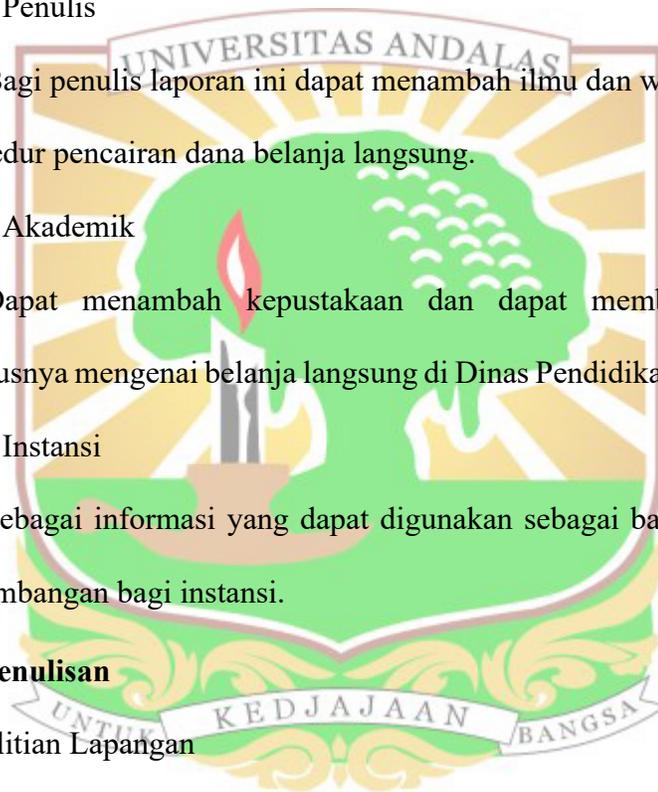
3. Bagi Instansi

Sebagai informasi yang dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi instansi.

1.5 Metode Penulisan

1. Penelitian Lapangan

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi langsung ke instansi terkait guna mendapatkan data yang diperlukan, serta mempelajari dan menganalisa data yang berkaitan dengan objek penulisan. Metode ini dilakukan dengan melaksanakan magang di Dinas Pendidikan Sumatera Barat.



2. Wawancara

Pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak yang dianggap perlu dengan data yang diperlukan.

3. Studi Pustaka

Penulisan laporan ini diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan perencanaan dan penganggaran kegiatan pembangunan sesuai dengan pokok pembahasan pada laporan magang ini, guna menyempurnakan penulisan laporan tugas akhir.

4. Pencarian Data Melalui Internet

Pencarian data melalui internet dilakukan dengan mencari bahan-bahan pendukung lainnya melalui situs-situs terkait. Dengan mengunjungi website dapat memberikan masukan bagi penulis untuk melengkapi data yang diperlukan guna untuk tugas akhir.

1.6 Tempat dan Waktu Magang

Kegiatan magang dilaksanakan di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, yang bertempat di Jl. Jend. Sudirman No.52, Jati Baru, Kec. Padang Timur, Kota Padang Sumatera Barat. Kegiatan ini dilaksanakan selama 40 hari kerja. Magang tersebut dilakukan dari tanggal 15 Juni 2020 – 7 Agustus 2020.

1.7 Sistematika Penulisan

Penulisan Laporan Kerja Praktek ini terdiri dari lima bab, dimana masing masing bab terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan secara singkat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, metode penulisan, tempat waktu dan kegiatan magang serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini membahas tentang landasan teori mengenai prosedur pencairan dana belanja langsung pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.

BAB III GAMBARAN UMUM

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum instansi yang terdiri dari sejarah dan perkembangan instansi, visi dan misi, gambaran umum instansi Pendidikan Sumatera Barat, struktur organisasi dan tugas dari masing-masing bidang kerja instansi.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis akan membahas prosedur pencairan dana belanja langsung pada Dinas Pendidikan Sumatera Barat.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulis mengambil beberapa pokok-pokok yang dapat dijadikan sebagai pelajaran atau masukan yang dituangkan kedalam kesimpulan dan saran.

